KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DALAM MEMBENTUK MANAJEMEN PEMBANGUNAN INDONESIA

Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons) *

Abstrak

*Pembangunan yang mengandung makna tentang proses dan upaya pencapaian pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik tentunya membutuhkan pengelolaan dan manajemen yang benar agar dapat berjalan secara efektif. Kebijakan makro ekonomi sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk pengendalian tingkat inflasi yang tinggi yang dapat menghambat jalannya pembangunan. Manajemen perubahan di Indonesia mempunyai kegagalan antara lain: gagasan *The Living Corporation* kurang atau menurun, *The Knowledge Base Society* yang kurang merata dan terbatas, gagal melihat perubahan pasar, gagal melihat dinamisme kelompok. Alasan lainnya adalah karena semakin besarnya hutang luar negeri secara total dimana *Debt Service Ratio (DSR)* nasional kita semakin tinggi. Oleh karena itu, peranan hutang luar negeri pemerintah terus diusahakan untuk dikendalikan antara lain dengan memaksimalkan usaha peningkatan penerimaan dalam negeri, khususnya sumber pajak, serta penekanan pengeluaran dengan cara mengurangi atau bahkan menghapus berbagai bentuk subsidi.*

Pendahuluan

Telah kita ketahui dan diakui bahwa para penyelenggara negara, baik itu negarawan, teknokrat, birokrat, politisi, dan para ilmuwan, membangun suatu negara, terutama membangun di bidang ekonomi atau disebut dengan pembangunan ekonomi sangatlah diperlukan suatu manajemen yang baik. Fokus dari analisis ini, adalah mengkaitkan peranan kebijakan makro ekonomi dalam membentuk manajemen pembangunan sebagai suatu proses pembangunan yang diselenggarakan negara bangsa dalam rangka pencapaian cita-cita negara, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan suatu masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di Indonesia sangatlah maju dengan pesat, termasuk manajemen pembangunan. Manajemen pembangunan Indonesia dengan harapan baru, tantangan baru, dan pemecahan masalah baru, maka untuk memenuhi harapan tersebut dipergunakan atau diperlukan instrumen baru pula dalam memecahkan masalah tersebut. Untuk menemukan instrumen baru berbagai kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka mencari instrumen baru terus dikembangkan, lahirilah suatu disiplin ilmu baru, teori-teori baru, sistem baru, dalil-dalil baru, rumus-rumus baru yang memberikan kontribusi cukup besar dalam manajemen pembangunan Indonesia, termasuk diantaranya adalah kebijakan ekonomi makro.

* Dosen STIA LAN Bandung

Memahami Pembangunan

Istilah pembangunan (development) lebih mengandung makna tentang proses dan upaya pencapaian peningkatan kualitas hidup. Atau *pembangunan* dapat didefinisikan secara luas yaitu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation-Building*).

Dari definisi pembangunan tersebut di atas muncul ide/gagasan pokok: Pertama: pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang merupakan satu bagian yang terkait (*never ending*). Kedua: pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai suatu yang harus dilaksanakan, dengan kata lain dalam rangka kehidupan bermasyarakat, bernegara berbangsa agar lebih baik atau ada peningkatan kualitas kehidupan. Ketiga: pembangunan dilakukan terencana, baik dalam arti jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada waktu tertentu di masa depan. Keempat: rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksud sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk berkembang dan tidak hanya untuk mempertahankan kemerdekaan atau kedaulatan bangsa saja, sedangkan perubahan mengandung makna bahwa suatu negara harus pro-aktif dan antisipatif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu ke jangka waktu lainnya.

Kelima: pembangunan mengarah pada modernitas, dapat diartikan sebagai cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Cara berfikir yang rasional dan budaya yang kuat dan fleksibel. Modernitas yang akan ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat multidimensional, artinya mencakup seluruh segi kehidupan baik itu politik, ekonomi, dan sosial budaya serta keamanan. Keenam: pembinaan ditujukan untuk memperkokoh fondasi dan semakin mantapnya keberadaan negara bangsa, sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa lainnya.

Jadi dipandang dari sudut ekonomi, pembangunan yang harus dibangun terutama adalah: Pertama: kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama peningkatan pendidikan, kesehatan, moaral, mental dan kemampuan untuk hidup bersama-sama dan saling membantu sehingga terciptanya kebersamaan dalam pembangunan. Kedua: sarana dan prasarana, fisik seperti jalan raya, pelabuhan, sarana transportasi, sarana komunikasi, produksi, sosial terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ketiga: kelembagaan-kelembagaan ekonomi modern, misalnya sistem hak kepemilikan, sistem keuangan, hukum, mekanisme pasar dan juga nilai pandangan tentang nilai mata uang.

Teori-teori Pembangunan

● Teori Harrod-Domar

Melihat pembangunan dapat dilaksanakan atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan kalau masyarakat mempunyai uang lebih untuk ditabung di bank-bank atau lembaga

keuangan otomatis dana yang dibank meningkat. Maka para investor untuk mengembangkan usahanya untuk mencari dana pinjam atau kredit di bank-bank untuk sebagai investasi. Jadi pada intinya perlu adanya tabungan dan investasi.

● Teori Neo Weberian

Menekankan perlu sikap hemat dan bekerja keras. Jadi kalau masyarakat hidup tidak boros dalam menggunakan sumber daya yang terbatas dan bekerja keras, maka pembangunan akan meningkat.

● Teori David Mc Cleland

Perlunya manusia di negara terbelakang atau dengan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, maka perlu diinjeksi suatu "virus" need-achievement (kebutuhan akan prestasi).

● Teori Rostow

Teori ini melihat pembangunan sebagai proses yang lurus dan terencana dan bertahap-tahap. Menurut Rostow ada 5 tahapan pembangunan sebagai berikut:

1. Tahapan Perekonomian Tradisional, pada tahap ini kegiatan ekonomi masih tradisional, masih berorientasi kebutuhan sendiri. Jadi produktivitasnya rendah, sedangkan aplikasi teknologi masih sangat terbatas. Menurut Rostow ciri-ciri tahapan ini antara lain; tingkat produktivitas masih rendah karena pemakaian teknologi modern terbatas; sebagian besar tenaga kerja disektor pertanian; struktur sosial bersifat hirarkis; hubungan kekeluargaan masih erat dan kekuasaan dipegang oleh mereka yang mempunyai tanah yang luas.

2. Tahap Pra Lepas Landas, maksud dari tahap pembangunan ini, dimana perekonomian tumbuh dan berkembang dengan kekuatan mandiri. Ciri-ciri atau indikator dari tahap ini antara lain; membaiknya kualitas SDM; makin cepatnya akumulasi pemupukan modal; berfungsinya lembaga keuangan modern.
3. Tahap Lepas Landas (Take Off), tahap ini ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi dan menerapkan teknologi dan manajemen makin luas dan intensif. Dengan demikian perekonomian dapat dipertahankan tingkat pertumbuhannya jangka panjang struktur ekonomi makin seimbang dan kuat, dimana peranan sektor ekonomi modern (industri dan jasa) makin besar. Ciri-ciri tahap ini antara lain: meningkatnya investasi dari < 5% menjadi 10% dari Produk Nasional Neto. Ciri-ciri dari tahap ini antara lain; berkembangnya beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi, yang dapat memacu sektor lainnya; terciptanya suatu kerangka dasar politik, ekonomi, sosial, lembaga-lembaga yang menyebabkan pertumbuhan jalan terus yang didukung oleh sumber dana dalam negeri.
4. Tahap Kedewasaan, tahap ini disusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang terbatas teknologi yang modern.

5. Tahap Konsumsi massa Tingkat Tinggi, tahap ini, atingkat konsumsi masyarakat sangatlah tinggi (*High Mass Consumption*), terutama konsumsi energi. Tahap ini mempunyai ciri-ciri antara lain; adanya jaminan yang lebih baik bagi angkatan kerja; tersedianya konsumsi bagi rakyat yang semakin memadai; negara mencari perluasan kekuatan dimata dunia.

Kelebihan dari pembangunan Indonesia di masa lalu antara lain: pada tahun 1966, khasanah pembangunan, didukung oleh ahli ekonom-ekonom lulusan perguruan luar negeri, dimana mengembangkan sebuah pendekatan pengelolaan pendekatan yang serba pembangunan.

- Pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan yaitu dengan repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun.
- Ditariknya para ekonom kelas satu (teknokrat) untuk dijadikan suatu elit politik ekonomi sebagai penentu kebijakan ekonomi nasional.

Kelemahan dari pembangunan Indonesia di masa lalu antara lain:

- Pembangunan pada saat itu bukanlah pembangunan yang sangat terencana.
- Menurut Radius Prawiro mengatakan bahwa pada saat itu terjadinya adalah perubahan dulu, perencanaan belakangan (1998).
- Pendekatannya berjalan sambil memperbaiki.

Pengendalian Inflasi Melalui Kebijakan Ekonomi Makro

Salah satu faktor utama dalam pengendalian ekonomi makro adalah tingkat inflasi, yang di

Indonesia diukur menurut tingkat perubahan Indeks harga Konsumen (IHK).

Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi, perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit pula cara penanggulangan inflasi. Kombinasi kebijakanyang beragam harus digunakan secara tepat, seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, kebijakan penentuan harga dan indexing.

Dalam kerangka kebijaksanaan moneter, inflasi dapat dikekang dengan cara mengatur menaikkan dan menurunkan tingkat bunga fasilitas diskonto.

Sedangkan pada kebijaksanaan fiskal, penganggungan inflasi dapat ditempuh diantaranya dengan penanggungan inflasi dapat ditempuh diantaranya dengan menciptakan surplus anggaran, yakni dengan jalan menurunkan permintaan total melalui penurunan pengeluaran pemerintah ataupun menaikkan tarif pajak.

Dalam hal kebijaksanaan tarif, pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan menurunkan tarif bea masuk untuk barang-barang impor. Hal ini diharapkan akan biaya produksi menjadi lebih rendah dan seterusnya mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran.

Kebijaksanaan penetapan harga maksimum (*ceiling price*) dan penentuan indeks upah bagi buruh juga dapat mengendalikan inflasi, terutama bagi barang-barang dan industri-industri yang mempunyai proposasi besar dalam mengerek laju inflasi.

Pengendalian inflasi sebenarnya harus dilakukan dengan membandingkan tingkat inflasi dalam negeri dengan tingkat inflasi di negara mitra dagang utama. Tingkat inflasi yang lebih tinggi di dalam negeri

dibandingkan dengan mitra dagang utama akan menyebabkan harga relatif produk ekspor akan meningkat di luar negeri, sehingga mengurangi daya saing produk tersebut di pasar internasional. Oleh karena itu, manajemen nilai tukar juga menjadi bagian penting dalam kerjasama pengendalian inflasi secara terpadu.

Manajemen Pembangunan

Manajemen pertama kali diperkenalkan oleh F. Taylor sebagai suatu ilmu yang scientific atau ilmiah, dimana setiap produktivitas atau aktivitas suatu organisasi memerlukan manajemen (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Jadi dapat didefinisikan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang didesign dan dipelihara/dipertahankan hubungan antara individu-individu untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang efisien dan efektif.

Dari definisi tersebut dikaitkan dengan pembangunan dapat didefinisikan *manajemen Pembangunan* adalah seluruh proses usaha atau upaya yang dilakukan oleh sebuah negara bangsa untuk tumbuh, berkembang, berubah secara sadar dan terencana dalam segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir.

Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan "upaya nasional" artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggungjawab dari pemerintahan dengan segenap aparat dan jajarannya, akan tetapi juga melibatkan ilmuwan, politisi, juga berperan aktif dan ikut serta dalam

pembangunan, singkatnya pembangunan merupakan urusan semua pihak dalam masyarakat atau negara bangsa. Dalam melakukan kegiatannya pembangunan tidak hanya warga masyarakat bangsa yang berperan sebagai "penonton" saja, tetapi juga semua harus berperan sebagai "pemain". Jadi fokus utama manajemen pembangunan adalah optimalisasi semua sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi (negara).

Manajemen pembangunan dengan manajemen pemerintahan saling erat hubungannya, tidak hanya mencakup bidang pemerintahan saja, tetapi juga harus mencakup seluruh kegiatan yang menunjang pengelolaan bisnis, nirlaba, politik, sosial budaya. Kata kuncinya pengelolaan segenap sumber daya ekonomi, politik, kultural, pada satu hal yaitu membangun segenap manusia seluruh Indonesia dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Pada pemerintahan kepemimpinan yang lalu, manajemen menggunakan pola POLC (Planning, Organizing, Leading, Controlling). Pada awalnya pembangunan dilakukan dengan disiplin dan konsisten. Dan puncaknya pada tahun 1996 yaitu pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun 7% , pendapatan perkapita US \$ 1.300 (atau US \$ 5.000 ukuran purchasing power parity), ditopang terjaganya stabilitas nasional dan tingginya kredibilitas pemerintahan.

Namun dimasa tersebut manajemen pembangunan mempunyai beberapa kegagalan antara lain:

- Gagasan "The Living Corporation" kurang atau menurun, dimana organisasi yang hidup tidak hanya beradaptasi saja, tetapi yang penting adalah organisasi yang belajar (*Only living beings can*

learn). Penyebab krisis, bukan pengerjaan salah/buruk, akan tetapi penyebabnya adalah *pertama*: asumsi-asumsi yang dipakai dalam mendirikan dan menjalankan organisasi (manajemen) tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan perubahan lingkungan; *kedua*: asumsi tentang misi organisasi tidak jelas; *ketiga*: asumsi kompetensi utama mencapai misi organisasi tidak jelas.

- *The Know ledge Base Society* atau masyarakat berpengetahuan yang kurang merata atau terbatas. Basis pengetahuan atau teknologi kurang diperhatikan, padahal basis pengetahuan dan teknologi merupakan investasi di masa mendatang, terbukti masih rendahnya anggaran di bidang pendidikan atau yang mendukung teknologi.
- Gagal melihat perubahan “pasar”, dimana diumpamakan menyetir pesawat dengan memakai SIM-C atau dengan kata lain merencanakan pembangunan tidak melihat kemampuan Sumber daya, keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Contohnya proyek pesawat terbang (PT IPTN), dimana harga jual atau pemasarannya dibarter dengan beras, padahal kita memproduksi dalam hal beras cukup baik dan tanah dan iklimnya sangat menunjang.
- Gagal melihat dinamisme kelompok sebagai faktor positif yang memberikan energi bagi proses perubahan organisasi dan manajemen.

Kondisi Hutang Luar Negeri dalam Pembangunan

Salah satu penyebab sikap pemerintah yang berhati-hati adalah kenyataan semakin kurang efektifnya kebijakan moneter untuk menghambat laju inflasi dalam dunia yang pasar uang dan modalnya sudah semakin terintegrasi, seperti diuraikan di atas.

Namun alasan lainnya adalah karena semakin besarnya hutang luar negeri secara total dimana Debt Service Ratio (DSR) nasional kita semakin tinggi. Oleh karena itu, peranan hutang luar negeri pemerintah terus diusahakan untuk dikendalikan antara lain dengan memaksimalkan usaha peningkatan penerimaan dalam negeri, khususnya dari sumber pajak, serta penekanan pengeluaran dengan cara mengurangi atau bahkan menghapus berbagai bentuk subsidi.

Cara lain yang dilakukan sejak terjadinya pemanasan ekonomi pada tahun 1991 adalah pembentukan TIM PKLN yang mengkoordinasikan pinjaman luar negeri pemerintah dan lembaga serta proyek terkait. Usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan swasta demi menciptakan suasana yang kompetitif dan peningkatan peranan mekanisme pasar sebagai antisipasi terhadap globalisasi ekonomi, menimbulkan konsekuensi lain, yakni semakin besarnya kebutuhan dana oleh pihak swasta. Namun tingginya bunga pinjaman di dalam negeri menyebabkan hutang luar negeri swasta terus meningkat dan DSR swasta semakin besar (lihat tabel 1.1), sehingga pemerintah terus berusaha menekan pinjaman luar negerinya

Tabel 1.1.

Debt Service Ratio Nasional, Pemerintah, Swasta dan BUMN
Tahun 1992/1993 sampai dengan Tahun 1997/1998

Tahun	Debt		Service	Ratio
	Nasional	Pemerintah	Swasta	BUMN
1992/93	39,5	24,0	13,4	2,2
1993/94	30,7	18,7	10,4	1,6
1994/95	32,7	17,7	13,4	1,5
1995/96	32,6	16,4	14,8	1,4
1996/97	31,7	14,1	15,5	2,1
1997/98	31,2	11,8	17,8	1,6

Sumber: Departemen Keuangan

Manajemen Pembangunan Indonesia

Manajemen yang dibutuhkan sekarang ini adalah manajemen bukan saja mampu memanagerkan perubahan, melainkan menciptakan dan mengkreasikan nilai dari perubahan tersebut. Manajemen Pembangunan Indonesia Baru yang dibutuhkan oleh negara Republik Indonesia haruslah mengandung asumsi-asumsi baru. Asumsi-asumsi tersebut antara lain:

1. Negara Indonesia berada dalam lingkungan global yang bukan saja mengimplikasikan kerjasama yang global, tetapi juga mengimplikasikan kompetisi-kompetisi global, sehingga akan memacu bagi pelaku ekonomi/bisnis untuk menghadapi kompetisi-kompetisi tersebut dengan meningkatkan kualitas/mutu produk yang

akan dikompetisikan. Dalam kompetisi global, berskala global pelaku bisnis/ekonomi harus mampu menciptakan nilai (*create value*) dalam takaran global atau standart internasional, sehingga dimasa yang akan datang akan tercipta suatu pelaku bisnis/ekonomi yang *world class* atau kelas dunia.

2. Negara Indonesia memiliki masyarakat yang berpengetahuan dan dalam lingkungan dimana informasi dapat diakses dengan mudah, murah, dan cepat. Dengan situasi ini sebaiknya pemerintah dengan kebijakannya mendorong agar produk-produk yang berbasis IPTEK /computer dapat terjangkau oleh masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu dengan dikurangnya pajak masuk (untuk barang-barang import) agar

produk yang berbasis teknologi murah dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian masyarakat khususnya dalam hal ini pemerintah (aparatur) perlu ditingkatkan SDM-nya atau membangun dirinya sendiri sehingga terciptanya "Good Governance" yaitu kesediaan pemerintah untuk bersikap pro-aktif kepada pasar (masyarakat). Manajemen Pembangunan harus mengacu pada permintaan pasar yaitu artinya pembangunan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang akan dibangun. Good Governance, bukan hanya menyangkut keunggulan dalam arti teknis dan strategi saja, melainkan juga menyangkut standart-standart etika yang rentang sangat luas; dari hal transparansi, pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan pengelolaan berlandaskan etika dan moral yang baik, sehingga KKN dapat diberantas dengan secara konsisten.

3. Manajemen pembangunan Indonesia memerlukan pimpinan-pimpinan yang mempunyai kriteria antara lain:

- *Kapasitas*, maksudnya pemimpin berpengetahuan luas, cerdas, pandai, berpandangan luas, humanisme.
- *Inovasi dan kreatif*, maksudnya pemimpin menemukan ide-ide baru, kreativitas-kreativitas baru, menemukan metode-metode baru, sistem-sistem baru dan dipergunakan dalam melaksanakan tugasnya.
- *Jujur*, maksudnya pemimpin harus mempunyai sifat jujur, transparan, tidak KKN, sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

- *Profesional*, maksudnya pemimpin harus memenuhi tuntutan yang semakin meningkat dengan berkembangnya teknologi, pengetahuan yang maju dengan pesatnya, sehingga pemimpin dalam hal ini pemerintah dituntut profesional untuk meng-cover tuntutan tersebut dengan diklat, pelatihan, pendidikan yang lebih mutakhir dan dapat meningkatkan mutu yang tinggi, tepat waktu, cermat.

Penutup

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen pembangunan Indonesia baru diperlukan suatu "paradigma baru" dalam hal ini manajemen pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional dituntut peran-peran sebagai berikut:

- *Peran selaku inovator dan pelopor*, maksudnya pemerintah dalam memanageri pembangunan menggunakan metode-metode yang baru, inovasi-inovasi yang baru, sistem-sistem yang baru, dan cara berfikir baru untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Tidak masyarakat dulu yang untuk disodorkannya sebagai inovator atau pelopor tetapi terlebih dahulu aparat pemerintah, lalu mendorong masyarakat.
- *Peran selaku Stabilisator*, maksudnya pemerintah menstabilkan keadaan dalam negeri itu aman, tenteram, dan terkendali baik itu bidang ekonomi, politik, sosial budaya, sehingga terciptanya suasana yang kondusif untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha dan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

- *Peran selaku Modernisator*, maksudnya pemerintah baik pemimpin, aparat, dan jajarannya diperlukan penguasaan teknologi yang modern, berpengetahuan, sehingga pemerintah dalam menjalankan tugasnya dijalankan dengan profesionalisme yang tinggi, manajerial baik, pendidikan yang handal. Dengan demikian legitimasi pemerintah baik dan simpatik masyarakat terhadap pemerintahan baik lalu mengarah pada kehidupan yang lebih baik dan modern.

Menurut Mc Kinsey (Peter dan Waterman, 1992) kemampuan pemimpin negara bangsa tidak hanya cerdas dan pandai, tetapi juga kemampuan manajerial yang benar. Kerangka kerja yang diutarakan oleh Mc. Kinsey yaitu kemampuan untuk :

- Membuat struktur dan merestrukturisasi.
- Membuat strategi dan mengimplementasikannya.
- Membuat sistem dan menjalankannya.
- Menguasai skill dan mendayagukannya.
- Menyusun staf dan memperdayakannya.
- Membangun gaya dan seni pengelolaan yang baik.

Jadi suatu "paradigma baru" manajemen pembangunan Indonesia baru merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi pembangunan nasional negara Indonesia, maka pemerintah baik itu pemimpin atau aparatnya harus mempunyai sifat antara lain; aparat yang berdayaguna; berhasil guna; produktif, bersih dan berwibawa, profesional, kreatif, inovatif, transparan, antisipatif dan proaktif, dll.

Penanggulangan masalah inflasi melalui berbagai kebijakan ekonomi makro harus terus dilakukan baik melalui kebijakan

moneter, kebijakan fiskal, kebijakan tarif, kebijakan penentuan harga, dll. Hal ini dimaksudkan agar dapat menekan kecenderungan harga-harga yang terus meningkat dan mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat serta menghambat proses pembangunan.

Daftar Pustaka :

- Alesina dan Perroti (1995), "Fiscal Adjustment In OECD Countries: Composition and Macroeconomics Effects", *Economic Policy* 21, October 1995
- Arief, Sritua (1998), "Teori dan Kebijakan Pembangunan," CIDES, Jakarta
- Basri, Faisal (1997), "Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Distorsi, Peluang dan Kendala," FEUI, Jakarta
- Dornbusch dan Fischer (1990), "Macroeconomics", 5th Edition, Mc. Graw Hill, Singapore
- Djiwandono, Soedradjat (2002), "Masalah Burden Sharing Pembiayaan BLBI antara Pemerintah dan BI", *Pacifik Link*
- Goeltom, Miranda (2000), "Kebijakan Ekonomi Makro dengan Integrasi Pasar Uang dan Globalisasi", LPEM-FEUI
- Juoro, Umar (2000), "Pemulihan Ekonomi Terancam", *Centre for International Development Studies*
- Rachbini, Didik (2001), "Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia", *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*